

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*. PT Sosfmedia. Medan.
- Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko. 2024. *Tindak Pidana Korupsi*. PT Literasi Nusantara Abadi Group. Malang.
- Andi Tenri Famauri Rifai. 2022. *Pengungkapan Kerugia Negara Melalui Audit Forensik*. Bintang Semesta Media. Yogyakarta.
- Bambang Waluyo. 2006. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*. Sumber Ilmu Jaya. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 1989. *Tindak Pidana Perpajakan*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Sugono. 2009. *Metodolgi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.
- Chidir Ali. 1979. *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pidana Korupsi*. Binacipta. Jakarta.
- Dwi Ratna Kartikawati. 2011. *Hukum Pajak*. CV. Elvaretta Buana. Jawa Barat.
- Dr. Sahya Anggara. M.Si. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Dr. Hadiyanto, S.H. LL.M. 2022. *Hukum Keuangan Negara di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Rajawali Pers. Depok.
- Eddy O.S Hariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Febby Mutiara Nelson. Mei. 2026. *Mengurai Batas Pidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Keputusan Bisnis Suatu Kajian Multidisiplin*. Demera Press. Jakarta.

- Gunardi. 2022. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Damara Press. Jakarta.
- H. Bohari, S.H., M.S. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- HR Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo. Yogyakarta. 2010.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Buku Litera. Yogyakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. University Press. NTB.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2013. *Intreprestasi Tentang Makna Uang Negara dan Kerugian Negara Dalam Perkara Pidana Korupsi Terkait BUMN Persero (Kajian Tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung Tahun 2005-2011) Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan*, Badan Litbang Diklat Kumdil. Mahkamah Agung.
- Nasaruddin Umar. 2019. *Hukum Tindak Pidana Korupsi, Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. LP2M IAIN. Ambon.
- O.C Kaligis. 2007. *Kumpulan Kasus Menarik Jilid II*. O.C Kaligis & Associates. Jakarta.
- Paulus Efendie Lotulung. 1994. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rochmat Soemitro. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. PT Eresco. Bandung.
- R. Santoso Brotodihardjo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Santoso Brotodihardjo. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT Eresco. Bandung.
- Sudharmawatiningsih. et.all. 2022. *Sistem Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Bidang Perpajakan*. Kencana. Jakarta.
- Siti Kurnia Rahaya. 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu Yogyakarta.

Siska Trisia. *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Mappi FHUI. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 1984. *Hukum Acara Perdata*. Liberty. Yogyakarta.

Soerjano Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. UI Press.

Topo Santoso. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Depok.

Topo Santoso. 2021. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Depok.

Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media. Yogyakarta.

William N. Dun. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Yoserwan dan Nani Mulyati. 2021. *Hukum Pidana Ekonomi*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej. 2023. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Rajawali Pers. Depok.

B. Skripsi/Thesis/Disertasi/Jurnal

Arrahman. 2015. *Kriminalisasi Terhadap Kebijakan Aparatur Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Aris Tianto. 2018. *Perlakuan Pajak Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Potensi Peningkatan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Reklamasi Pantai Teluk Jakarta dengan Tersangka M. Sanusi)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.

Aldi Wildan Maris, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan sebagai Salah Satu Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No.3 Juli 2024

Bina Yumanto dan Paruhum Aurora Sotarduga Hutaaruk. Oktober 2022. *Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Pajak: Teori dan Praktik*. Scientax Jurnal Kajian Ilmia Perpajakan Indonesia. Volume 4. Nomor 1.

Bram Mohammad Yasser. 2018. *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Andalas..

Ela Suryani. Desember 2023. *Dampak Undang-Undang Korupsi Dan Penyalahgunaan Dana perpajakan diindonesia*. Jurnal Sosial Humaniora Sigli. Volume 6. Nomor 2.

Fatkhurohman. Maret 2017. *Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*. Jurnal Konstitusi. Volume 14. No.1.

Gustinof Hase Putra. Kurnia Warman. dan Anton Rosari. Agustus 2024. *Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal di Sumatera Barat*. Nagari Law Review. Volume 8 Number 1.

Herlina Dame Ria Sinaga. 2016. *Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Di Kejaksaan*. Thesis. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Airlangga.

I Nyoman Octaria Andi. Bambang Hartono. dan Sutan Hartono. Maret 2025. *Pertimbangan Hakim Praperadilan Terhadap Tidak Sahnya Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Pra/2024/PN.Kbu)* REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law Vol. 2 No. 1.

KMS. Herman. Faisal Santiago. dan Bambang Bernathos. 2018. “*Rekonseptualisasi Tindak Pidana Pajak Yang Merugikan Keuangan Negara Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”, *Jurnal Lex Publica*, Vol. V No.2.

Lutfil Ansori. 2015. *Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015.

Laporan Penelitian. 2010. *Makna “Uang Negara” Dan “Kerugian Negara” Dalam Putusan Pidana Korupsi Kaitannya Dengan BUMN/Persero*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

M. Rikhardus Joka. 2022. *Tindak Pidana Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Menurut Undang-Undang Ketentuam Umum Perpajakan*. Jurnal Justice Voice. Volume 1 No.2.

Muhammad Djafar Saidi. 1 Maret 2013. *Tindak Pidana Korupsi di bidang Perpajakan*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 2 Nomor 1.

Marulak Pardede. September 2020. *Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan*. Jurnal Penelitian Hukum. Volume 20 Nomor 3.

Men Wih Widiatno. September 2022. *Pembuktian Kerugian Pada Pendapatan Negara Dalam Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia*. Forum Ilmiah Volume 19 Nomor 4.

Nana Rosita Sari dan Fahmi Asyhari. 2022. *Analisa Yuridis Terhadap Asas Lex Specialis Systematis Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus Putusan No.95/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg Atas Nama Asri Murwani)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Volume 10. Nomor 2.

Nofan Hidayat, Rihantoro Bayu Aji, dan Taufiqurrahman, Penerapan Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana Terhadap Korban Anak, Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity”.

Nindi Achid Arifki. Maret 2019. *Penyelesaian Kerugian pada Pendapatan Negara melalui Pengungkapan Ketidakbenaran (Suatu Kajian Hukum Doktrinal Dalam Sistem Perpajakan)*. Jurnal Suara Hukum, Volume 1. Nomor 1.

Nur Hasanah Ariyanti dan Citra Delia Anjani. Sept-December 2024. *Penerapan Prinsip Una Via sebagai Restorative Justice dalam Kejahatan Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Media Hukum Indonesia. Vol. 2, No. 4.

Putri Madaniah. Rizqiana Khalida, dan Suhady. Januari 2026. *Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Vs Tax Evasion (Penggelapan Pajak): Analisis Etika Bisnis Islam*. Jurnal Transformasi Hukum dan Keadilan Sosial, Vol. 10, No. 1.

Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah. Oktober 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administerasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amenesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Semarang*. Jurnal Akuntansi dan Dewantara. Volume 1 Nomor 2.

Rudi Kurniawan dan Didik Endro Purwoleksono. Oktober 2019. *Politik Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan*, Jurnal Pamator, Volume 12 No. 2.

Shidarta dkk. *Penerapan Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim, Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 2011*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Jakarta.

Utrecht. Hukum Pidana I.

C. Internet

<https://sulteng.antaranews.com/berita/318645/taat-pajak-sebagai-sumbangsih-warga-kepada-negara>

<https://sumbar.bpk.go.id/pemerintah-resmi-kenakan-pajak-pertambahan-nilai-12-persen-per-1-januari-2025/>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211021123320-4-285440/kejahatan-pajak-orang-ri-palsukan-npwp-sampai-cuci-uang>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/koruptor-kebanyakan-dari-daerah-lt4f1808da429b5/>

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/rumusan-masalah>

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/contoh-kerangka-berpikir#:~:text=Kerangka%20berpikir%20adalah%20suatu%20dasar,Mulai%20dari%20awal%20hingga%20akhir.>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/>

<https://www.pajak.go.id/en/node/71047>

<https://www.mkri.id/berita/polri-sebut-penerapan-pasal-14-dalam-uu-tipikor-gunakan-asas-kekhususan-sistematis-23912>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/uji-materiil-pasal-14-uu-tipikor--kontroversi-blanket-provision-dan-korupsi-lintas-sektor-lt68e35ffd4b859/>

<https://datun.kejaksaan.go.id/page/berita/VS9uaW5zRVBnblU0Y2N4RDZ6MEZoQT09>

<https://www.pajak.go.id/en/node/71047>

<https://www.tempo.co/hukum/kata-pakar-ui-soal-kerugian-negara-kasus-tom-lembong-rp-194-7-miliar-2049607>

<https://antikorupsi.org/id/article/menilai-inpres-proyek-strategis-nasional>

<https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Tulisan-Hukum-DISCRETIONARY-POWER.pdf>

<https://news.detik.com/kolom/d-5156693/rendahnya-serapan-anggaran-kementerian>

<https://analisis.kontan.co.id/news/potensi-kejahatan-keuangan-di-dana-covid>

<https://antikorupsi.org/index.php/id/article/ketidaksepakatan-kpk-bpk>

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-tindak-pidana-perpajakan-0im>

<https://repository.stiemce.ac.id/995/3/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>

<https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/insentif-pungutan-pajak-masih-diterima-kepala-daerah-lt4cd48f2a989d5/>

<https://www.antaranews.com/berita/4452877/kemendagri-dorong-pemda-beri-insentif-retribusi-daerah-basis-kinerja>

https://pn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/Artikel_R-Deddy-H_Korupsi-Pasal-3.pdf

<https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1493198-menilik-asas-asersi-dalam-keabsahan-lhp-kerugian-keuangan-negara>